

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Kepala desa memegang peranan penting dalam kontestasi politik lokal, salah satunya adalah pemilihan calon legislatif. Meskipun memiliki keterbatasan sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai pejabat publik, namun hal ini tidak mengurangi keahlian kepala desa sebagai broker politik. Tugas utama seorang kepala desa sebagai broker politik adalah dengan mendistribusikan sumber daya kandidat kepada pemilih dan nantinya ditukar dengan suara yang menjadi tiket kandidat meraih kursi di DPRD Kabupaten Tuban. Walaupun tidak bisa secara terang – terangan mengampanyekan kandidat namun kepala desa masih bisa mempengaruhi pemilih dengan himbauan kala mendistribusikan sumber daya. Secara berulang – ulang dan terus menerus kepala desa menjelaskan asal bantuan dan meyakinkan kepada pemilih tentang komitmen kandidat dalam menyelesaikan masalah warga. Selain itu, peran seorang kepala desa juga menyediakan jejaring politik yang bersumber dari jaringan kekerabatan dan individu yang memiliki pengalaman dalam pertarungan di pemilihan kepala desa. Jejaring yang dibentuk oleh kepala desa ini mampu memberikan informasi sehingga kandidat bisa mengambil keputusan yang efektif karena anggota tim pemenangan mampu memberikan informasi tentang pilihan pemilih hingga di tingkatan keluarga.

Informasi yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan pilihan pemilih namun juga ditindaklanjuti untuk memutuskan besaran nominal kala menerapkan pembelian suara. Hal ini penting bagi kandidat untuk mempertimbangkan biaya politik yang besar dalam politik elektoral sehingga kandidat bisa memutuskan siapa saja dan nominal yang perlu disediakan untuk mengamankan suara pemilih secara tepat.

## 6.2 Saran

Berdasarkan analisis peran kepala desa sebagai broker politik dalam pemilihan anggota legislatif, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan integritas dan partisipasi politik yang sehat di tingkat desa:

1. **Mendorong pemberdayaan Partisipatif di tingkat desa.** Termasuk pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Ini dapat dilakukan melalui forum terbuka, dialog masyarakat, dan mekanisme partisipatif lainnya.
2. **Pelatihan dan Pendidikan Politik.** Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan politik untuk kepala desa dan masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, tata kelola yang baik, dan peran setiap warga dalam proses politik.
3. **Peningkatan Transparansi.** Mendorong transparansi dalam hubungan antara calon legislatif dan kepala desa. Ini termasuk mengkomunikasikan dengan jelas tentang dukungan politik dan memastikan bahwa tindakan dan keputusan kepala desa didasarkan pada integritas dan kepentingan masyarakat.
4. **Mendorong Kode Etik.** Mengembangkan dan mendorong penerapan kode etik bagi kepala desa dan calon legislatif. Kode etik ini dapat membantu memastikan perilaku yang etis dan meminimalkan risiko konflik kepentingan.
5. **Penguatan Lembaga Desa.** Memperkuat lembaga-lembaga di tingkat desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan membantu proses politik lokal.
6. **Pendekatan Inklusif.** Mengadopsi pendekatan inklusif yang mengakomodasi berbagai suara dan aspirasi masyarakat. Membuat lingkungan yang mendukung untuk berbagai kelompok dan memastikan bahwa seluruh masyarakat merasa diwakili.
7. **Monitoring Independen.** Mendorong dan mendukung upaya monitoring independen terhadap proses politik lokal, termasuk pemilihan anggota

legislatif. Ini dapat menciptakan rasa kepercayaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokratis.

- 8. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat.** Menggalakkan program pendidikan politik di masyarakat untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam proses politik.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan berintegritas di tingkat desa, sehingga setiap warga dapat merasakan dampak positif dari proses politik lokal.